



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKJIIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat. LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun LKjIP Tahun Anggaran 2024 yang memuat penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi, masalah utama yang dihadapi organisasi, perencanaan kinerja, capaian kinerja dan realisasi serta masalah yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan organisasi dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SYAFRUN, ST
Rembina
NIP. 19821126 201001 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
<hr/>		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	LATAR BELAKANG MASALAH	1
	TUGAS DAN FUNGSI	2
	LANDASAN HUKUM	3
	ASPEK STRATEGIS	5
	I. Faktor Eksternal	5
	II. Faktor Internal	6
	STRUKTUR ORGANISASI	12
	SISTEMATIKA PENULISAN	14
<hr/>		
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	RENCANA STRATEGIS	15
	RENCANA KINERJA	18
	PENETAPAN KINERJA	20
<hr/>		
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	CAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA	22
	CAPAIAN BERDASARKAN SERAPAN ANGGARAN	35
<hr/>		
BAB IV	PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri, maka dibutuhkan Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Private sektor dan masyarakat menuntut adanya koordinasi yang baik dan Intergritas, profesional maupun etos kerja, dan moral yang tinggi serta perlu adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dalam memperkuat peran dan kapasitas Akses informasi bagi masyarakat luas.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj disusun mengacu ke pada RENSTRA SKPD Tahun 2021-2026 dan Renja SKPD tahun 2024. LKj Dinas PERKIM megulas mengenai laporan kinerja dinas pada tahun 2024 mulai dari rencana kerja, penetapan kinerja, sampai kepada capaian kinerja Dinas PERKIM pada tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya PERDA tersebut terjadi perubahan struktur organisasi pada Dinas PERKIM yang sebelumnya masih satu instansi dengan Perkerjaan Umum (PU) setelah adanya PERDA maka di pecah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) dengan Tipe C dua bidang yaitu Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, TUPOKSI PERKIM adalah sebagai berikut :

Membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan Perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketatausahaan serta tugas jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi dan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Perencanaan Program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKj Tahun Anggaran 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan visi-misi sesuai renstra 2021-2026 dalam bentuk pelaksanaan pembangunan fisik Infrastruktur. Untuk melaksanakannya maka ditetapkanlah surat keputusan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan kedua atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- 11) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

I. FAKTOR EKTERNAL

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi;

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. Perencanaan program dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- e. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

II. FAKTOR INTERNAL

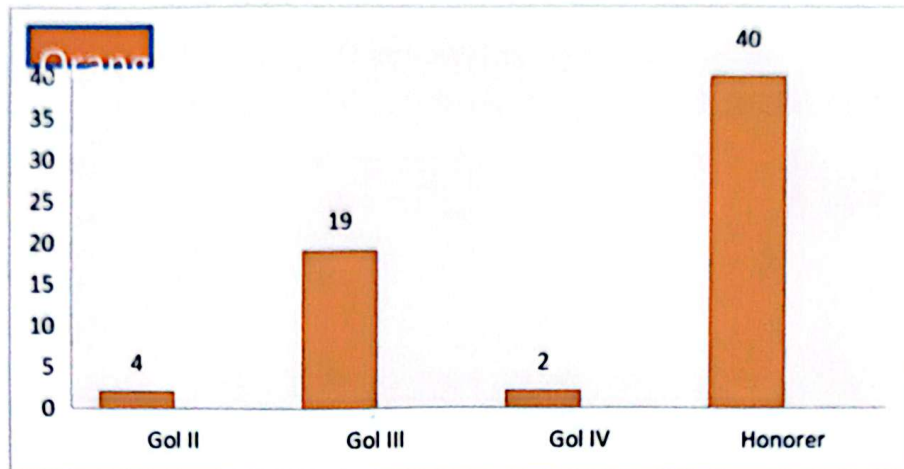
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki pegawai sebanyak 64 orang terdiri dari : Pegawai Negeri sipil (PNS) 24 orang, 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai TKK (Honorar) 40 orang. Dengan porsi 6 orang berada di jajaran struktural dan 19 orang pegawai berada pada jabatan fungsional. Melihat dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PERKIM masih mengalami kekurangan dari SDM Teknis mengingat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih menitikberatkan pada infrastruktur . Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga Non PNS pada khususnya Dinas PERKIM mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorar dengan jumlah sebanyak 40 orang. Tenaga honorar tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan

Berdasarkan golongan kepegawaian, perincian jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah :

Gambar 1.1

Komposisi Pegawai menurut Golongan



Berdasarkan Eselon rincian jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai menurut Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang	Ket
1	Kepala Dinas	II B	1	1		
2	Sekretaris	III A	1	1	-	
3	Kepala Bidang	III B	2	2	-	
4	Kasubbag	IV A	2	2	-	
5	Jabatan Fungsional	-	25	19	-	
Jumlah			31	25		

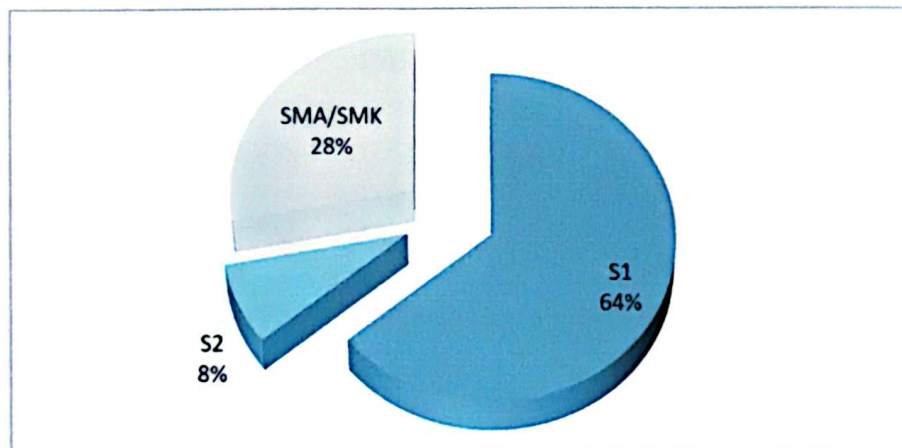
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan latar belakang pendidikan rincian jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

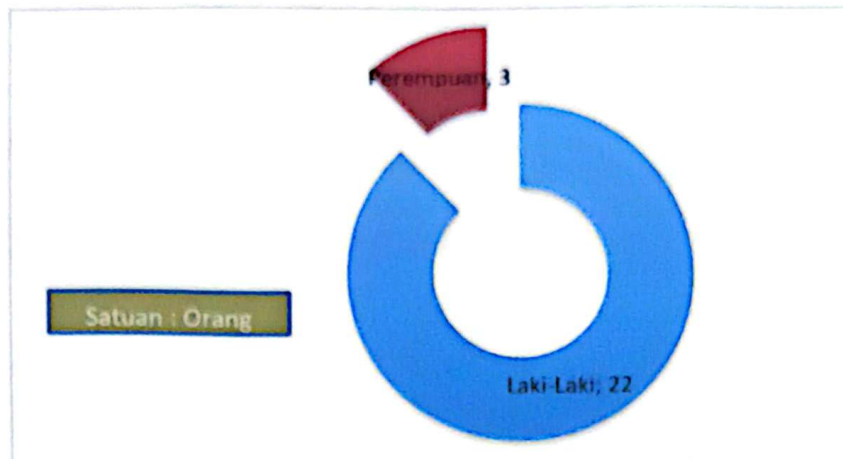
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	2	-
2	Strata 1 (S1)	17	-
3	Diploma	-	-
4	SMA/SMK	6	-
5	Total	25	-

Gambar 1.2
Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai



Berdasarkan jenis kelamin rincian jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

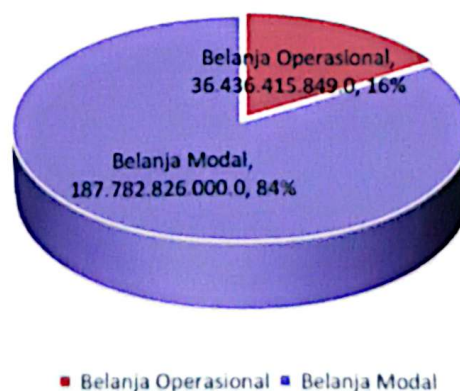
Gambar 1.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2. SUMBER DANA

Pagu Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan sebesar Rp. 224.219.241.849,- (Dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 5 program dan 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Berikut Komposisi pagu anggaran secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Komposisi Pagu Anggaran Dinas PERAKIM Tahun 2024



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

3. Secara terperinci Program Kegiatan serta Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel

**Program, Kegiatan serta Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2024**

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Kegiatan	PAGU ANGGARAN.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.040.257.849
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.130.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.130.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.878.950.799
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.929.870.799
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	949.080.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.450.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	136.450.000
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.334.133.550
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.985.750
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.484.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.070.000

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.134.800
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989.459.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	648.747.500
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	648.747.500
	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	15.412.798.000
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.281.400.000
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.123.398.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.510.048.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.808.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.770.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.990.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.965.480.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.571.000.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000
20	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000
21	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	400.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	671.000.000
22	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

23	Pembangunan Rumah Bagi Korban	271.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	24.529.869.000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	1.338.925.000
24	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.313.750.000
25	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh	25.175.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	23.190.944.000
26	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.664.000.000
27	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	21.526.944.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.922.230.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.922.230.000
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.922.230.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	168.155.885.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	168.155.885.000
29	Perencanaan Penyediaan PSU Perumaha	6.883.300.000
30	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	161.217.235.000
31	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	55.350.000
	JUMLAH	224.219.241.849

STRUKTUR ORGANISASI

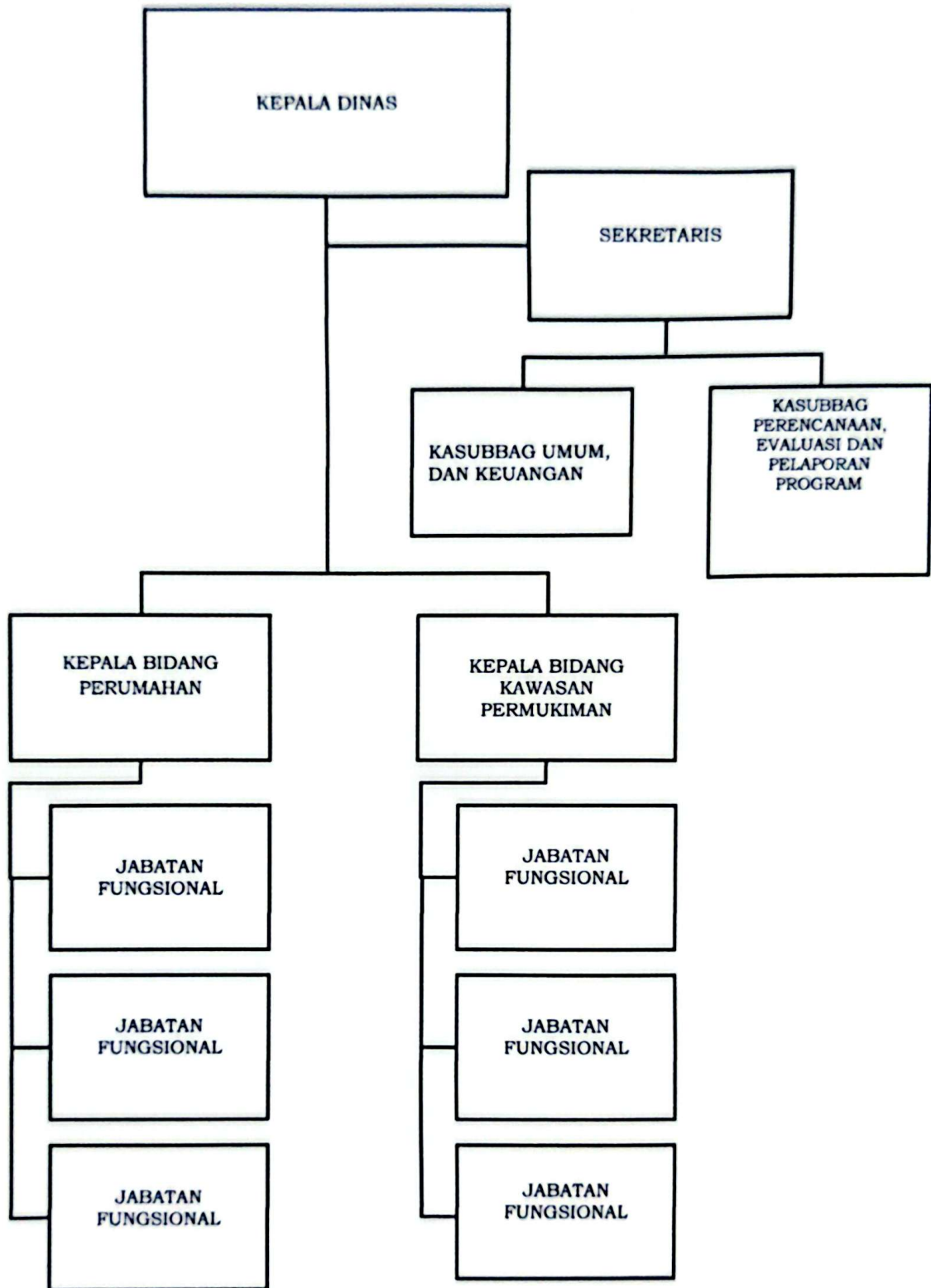
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang dibantu oleh:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perumahan dibantu oleh:
 - a) Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh:
 - a) Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.4

Struktur Organisasi PERKIM



SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan KEPMENPAN , RB N0 53 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN , menjelaskan singkat mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian
BAB II	PERENCANAAN KINERJA , menjelaskan mengenai Misi, Visi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta penjelasan singkat pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA , Menjelaskan mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 dengan perbandingan capaian pada tahun satu tahun kebelakang
BAB IV	PENUTUP , berisikan kesimpulan dari seluruh isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Tabel

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****RENCANA STRATEGIS**

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan suatu rencana berupa rencana strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Yang semuanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memfokuskan bidang kerjanya kepada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat kami uraikan sebagai berikut:

❖ VISI

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

***Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni,
Berkualitas dan Berkelanjutan***

Layak Huni : Mendorong pemenuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah yang terdampak pada korban bencana serta rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Berkualitas : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman yang baik sebagai sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian.

Tabel

Berkelanjutan : Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana mengacu pada tata ruang dan budaya lokal.

Dalam kaitan rumusan visi di atas maka dapat disampaikan berbagai batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi.

Terwujudnya Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Berhasil guna dan berdaya guna menunjukkan bahwa prasarana dan sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibangun sesuai dengan rencana teknis yang telah dibuat dan dapat bermafaat dan menunjang bagi keberhasilan pembangunan disektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Berwawasan lingkungan menunjukkan kualitas lingkungan fisik yang ramah terhadap lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang harus diciptakan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik.

Target pencapaian untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu terwujudnya prasarana dan sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhasil guna dan berdaya guna serta berwawasan lingkungan.

Tabel

❖ MISI

Mengacu pada visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat kami uraikan misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumahan yang Terjangkau dan Layak Huni
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang layak Huni dan Produktif melalui Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Terpadu, Handal dan Berkelanjutan

❖ TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

I. TUJUAN

- a. Mengurangi Kesenjangan pembangunan Desa dan Kota di kawasan perumahan.
- b. Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar di kawasan perumahan dan permukiman
- c. Meningkatnya pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman

II. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Tabel

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya
2		Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU
			Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha
3		Meningkatnya Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi bidang Perumahan dan Permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan perundang – undangan

RENCANA KINERJA

I. TARGET CAPAIAN KINERJA

Target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Capaian Kinerja

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal 2022	2022	2024	2024	2025	2026	Keterangan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	1. Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Bidang Perumahan	9,11	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	Rumah Layak Huni Tertangani Total Rumah Layak Huni X 100%
2		Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	2. Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Bidang Perumahan	60%	16,67	20%	25%	33,33%	100%	Perumahan yang Terfasilitasi PSU Total target Perumahan yang Tersedia X 100%
3		Meningkatnya Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi bidang Perumahan dan Permukiman	3. Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha 4. Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan perundang – undangan	Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan	9,85 Ha 0%	10% 100%	10% 100%	10% 100%	10% 100%	10% 100%	Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha Jumlah Total seluruh Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha X 100% Jumlah Registrasi yang diterbitkan Jumlah target Registrasi yang diterbitkan X 100%

PENETAPAN KINERJA

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tujuan, sasaran strategis diatas beserta program dan Kegiatan sebagai implementasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Target dan Program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	Program Pengembangan Permukiman	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
					Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
					Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
2		Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			Persentase Penurunan Kawasan Permukiman	Program Kawasan	Penerbitan izin pembangunan dan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel

			Kumuh di Bawah 10 Ha	Permukiman	pengembangan kawasan permukiman
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
3		Peningkatan Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan perundang – undangan	Program peningkatan pelayanan pelayan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Kegiatan Sertifikasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN BERDASARKAN KINERJA

Pada bagian ini akan diulas dan dianalisa hasil capaian kinerja atau lebih umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat. Penilaian LKjIP ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dalam tahun bersangkutan, mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana LKjIP merupakan laporan yang menampilkan data beserta analisisnya dari hasil pencapaian kinerja seluruh kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan dalam kurun satu tahun. Oleh karena itu LKjIP menjadi suatu bentuk pertanggung-jawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan Impact atau dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai presentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu SKPD.

Semua bentuk kegiatan harus mengacu pada Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari Visi dan Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran dinas. Karena berpedoman pada Visi Misi dinas, maka konsekwensi dari semua kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan Kinerja (LKj) Dinas PERAKIM Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta mengacu pula pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan peraturan tersebut kami telah menyusun RENSTRA Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Jadi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dengan RENSTRA Tahun 2021-2026 dan telah disesuaikan pula dengan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016 tersebut. Indikator Kinerja yang menjadi acuan dalam pembahasan LKj tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU). Semua bentuk kegiatan harus mengacu pada Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari Visi dan Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran dinas. Karena berpedoman pada Visi Misi dinas, maka konsekuensi dari semua kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mampu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seberapa besar kontribusi yang mau diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang kami laporkan dalam format LKjIP ini. Dalam LKjIP pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari Kinerja Sasaran.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan acuan skala pengukuran dalam 5 (lima) katagori, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 76$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan kinerja ini adalah dengan rumus pencapaian realisasi pelaksanaan indikator kinerja utama sasaran di bagi dengan target yang ingin dicapai sebelumnya pada indikator kinerja utama sasaran tersebut. Indikator kinerja yang menjadi acuan pada penilakai LKjIP Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	9,61
2		Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	25%
			Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	10%
3		Meningkatnya Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi , Klasifikasi dan registrasi bidang Perumahan dan Permukiman	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan perundang – undangan	100%

Pengukuran tingkat keberhasilan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan rumusan perbandingan antara Target capaian indikator kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan dengan realisasinya. berdasarkan hal tersebut, berikut capaian kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024.

❖ **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1**

Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	%	212,48	9,61	13,85	141,1

Indikator pertama untuk Sasaran 1 adalah **Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya**. Pada indikator ini target yang harus dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 9,61% di Tahun 2024.

Berdasarkan target tersebut, realisasi yang telah dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 141,1%. Dengan perhitungan 441 unit rumah yang direhabilitasi dibagi data akhir RTLH 2023 sebanyak 3.182, sehingga hasilnya mencapai 13,85%. Perbandingan pencapaian kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 terdapat selisih yang lumayan jauh, hal ini disebabkan oleh total realisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Pada Tahun 2023 terealisasi sebanyak 663 Unit Rumah dan Tahun 2023 sebanyak 441 Unit Rumah.



Adapun kegiatan yang menunjang capaian indicator ini antara lain:

1. Kegiatan BSPS Reguler

Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni ini, salah satunya didapat dari kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Tahun 2024 yang bersumber dari dana Reguler Sesuai Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: RU.1003-DR/1232 Tanggal 18 Oktober 2024 2023 tentang penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 Tahap XII bahwa alokasi jumlah unit BSPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 175 Unit Rumah dan Terealisasi 175 Unit Rumah, artinya untuk BSPS Reguler mencapai persentase sebesar 100% Adapun realisasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang Bersumber dari Dana Reguler Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi
1	Bram Itam	Pembengis	10	10
2	Pengabuan	Parit Bilal	10	10
3		Teluk Nilau	10	10
		Parit Sidang	60	60

4		Harapan Jaya	10	10
5	Seberang Kota	Muara Seberang	15	15
6		Tungkal V	10	10
7	Senyerang	Senyerang	10	10
8		Teluk Ketapang	10	10
9	Tungkal Ilir	Tungkal I	10	10
10		Patunas	20	20
11	JUMLAH		175	175

2. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tahun 2024.terbagi menjadi 2 Kelompok sasaran antara lain: Perbaikan Rumah Layak Huni yang berada di Kawasan Permukiman Kumuh sebanyak Unit dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh. Selanjutnya, Perbaikan rumah tidak layak huni yang diterima masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 215 unit dari 220 unit yang dianggarkan. Adapun penyebab tidak terealisasinya 5 unit ini dikarenakan penerima bantuan telah mendapatkan bantuan kegiatan Bedah Rumah Lainnya berupa Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024. Selanjutnya rincian dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Unit yang Dianggarkan	Realisasi Unit
1	TUNGKAL II	TUNGKAL ILIR	12	12
2	TUNGKAL III	TUNGKAL ILIR	12	12
3	TUNGKAL 1V KOTA	TUNGKAL ILIR	11	11
4	TUNGKAL HARAPAN	TUNGKAL ILIR	13	13
5	PATUNAS	TUNGKAL ILIR	12	12
6	MAKMUR JAYA	BETARA	10	7
7	PEMBENGIS	BRAM ITAM	10	10
8	TANJUNG SENJULANG	BRAM ITAM	10	10
9	BETARA KIRI	KUALA BETARA	20	20
10	SENYERANG	SENYERANG	5	5
11	TELUK KETAPANG	SENYERANG	5	5
12	TELUK NILAU	PENGABUAN	7	7
13	SUNGAI BAUNG	PENGABUAN	7	7
14	SUNGAI RAYA	PENGABUAN	6	6

TOTAL UNIT	140	137
-------------------	------------	------------

● Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Unit yang Dianggarkan	Realisasi Unit
1	SRIWIJAYA	TUNGKAL ILIR	10	10
2	KAMPUNG NELAYAN	TUNGKAL ILIR	20	20
3	MEKAR JAYA	BETARA	10	10
4	MERLUNG	MERLUNG	20	10
5	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	20	18
TOTAL UNIT			80	78

3. Kegiatan Dua Milyar Satu Kecamatan (DUMISAKE)

Kegiatan Dumisake yang diarahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kegiatan Bedah Rumah. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 459/KEP>BUP/DPUPR-7/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program DUMISAKE Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan DUMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2024 ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 51 Unit rumah. Adapun realisasi dari Program Dumisake

kegiatan Bedah Rumah ini sebanyak 51 Unit Rumah, artinya pencapaian kinerja kegiatan ini mencapai persentase 100%.

Berikut rincian lokasi Kecamatan dan Desa Penerima Bantuan Program DUMISAKE Kegiatan Bedah Rumah Provinsi Jambi Tahun 2024:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Target	Realisasi
1	Tungkal Ilir	Tungkal I	9	9
		Tungkal III	7	7
		Tungkal IV Kota	7	7
2	Bram Itam	Semau	7	7
		Kemuning	7	7
3	Betara	Mandala Jaya	7	7
		Makmur Jaya	7	7
	JUMLAH		51	51

❖ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100	20	100	100
2.	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	100	10	100	100

Indikator pertama Untuk Sasaran 2 adalah **Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU**. Pada indikator ini pencapaian kinerja telah mencapai 100%. Mengingat realisasi perumahan yang telah menghibahkan asetnya pada tahun 2024 sebanyak 1 perumahan. Adapun pada tahun 2023 sisa perumahan yang belum menghibahkan asetnya sebanyak 4 perumahan. Sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%

Indikator kedua Untuk Sasaran 2 adalah **Persentase Penurunan Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha** dengan harapan lokasi Kawasan kumuh yang telah di tetapkan pada Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: terdapat peningkatan dalam pengentasan Kawasan permukiman kumuh yang berada pada wewenang Kabupaten yakni di bawah 10 (sepuluh) ha. Cakupan yang dapat ditangani oleh Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian pengurangan Kawasan permukiman kumuh yang dalam hal ini berada pada Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal ilir antara lain, kegiatan jalan lingkungan, jembatan serta lampu jalan. Adapun capaian dari target 10% yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha adalah sebesar 9,85%. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut, Kawasan Kumuh Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir sebesar 10 % dan yang telah tertangani sebanyak 9,85 Ha. Dengan demikian Tahun 2024 Dinas perumahan dan Kawasan permukiman telah mencapai target dengan maksimal dengan persentasi 100%, yang mana secara rinci akan dijabarkan pada Tabel dibawah ini:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas SK 2017 (ha)	Capaian Pengurangan (ha)	Sisa Luasan Kumuh 2024 (ha)
1	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	44,06	44,06	0
2	Tungkal Ilir	Patunas	18,06	18,06	0
3	Tungkal Ilir	Sriwijaya	22,74	22,74	0
4	Tungkal Ilir	Tungkal IV Kota	38,08	38,08	0
5	Tungkal Ilir	Tungkal II	38,36	38,36	0
6	Tungkal Ilir	Tungkal III	38,85	38,85	0
7	Tungkal Ilir	Kampung Nelayan	35,10	25,16	9,94
8	Tungkal Ilir	Sungai Nibung	9,85	9,85	0
9	Bram Itam	Bram Itam Kiri	10,05	10,05	0
JUMLAH LUASAN (HA)			255,2	245,3	9,94

Selanjutnya program kegiatan yang menunjang pencapaian indicator ini adalah:

1. Pemeliharaan Prasarana, sarana dan utilitas

Realisasi Lampu Penerangan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024:

Tabel
Realiasi Lampu Jalan

No	Kegiatan	Realisasi Tahun 2024 (lokasi)
1.	Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	412



2. Penataan Jalan dan Jembatan Lingkungan

Capaian pada tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang kegiatan tersebut adalah;

Tabel

Reallasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Tahun 2024

No	Kegiatan	Realisasi Tahun 2024 (lokasi)
1.	Pembangunan/Peningkatan Jalan	419
2.	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	80
3.	Pembangunan/Peningkatan Drainase	22
4.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu	412
5.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	8
Jumlah		941

JALAN ASPAL JALAN BETON



JEMBATAN BETON



❖ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

Gambar 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

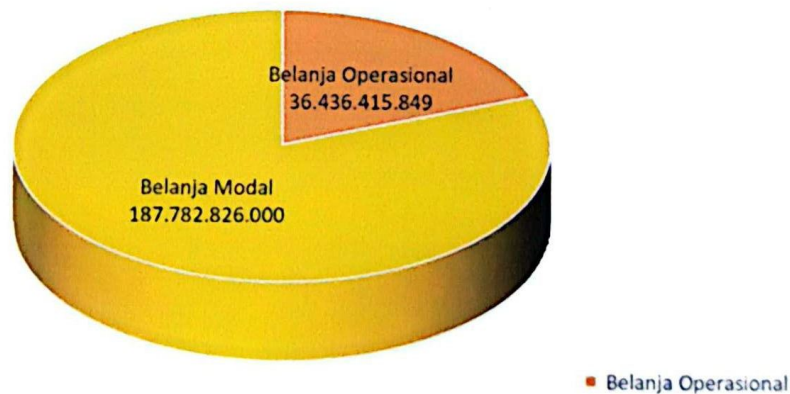
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1.	Persentase Registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	%	-	100	-	-

Indikator pertama untuk Sasaran 3 adalah Persentase registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan. Pada indikator ini target dan Pencapaian kinerja sebesar 0% di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 tidak terdapat developer yang mendaftar untuk melakukan mengembangkan perumahan di Tanjung Jabung Barat.

CAPAIAN BERDASARKAN SERAPAN ANGGARAN

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan kesediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 6 program dan 15 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Dengan rincian Pagu Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan sebesar Rp. 224.219.241.849,- (Dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan realisasidengan realisasi Rp. 220.918.835.887,- (Dua ratus dua puluh milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) Total serapan keuangan pelaksanaan kegiatan adalah sebesar 98.53 %, dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

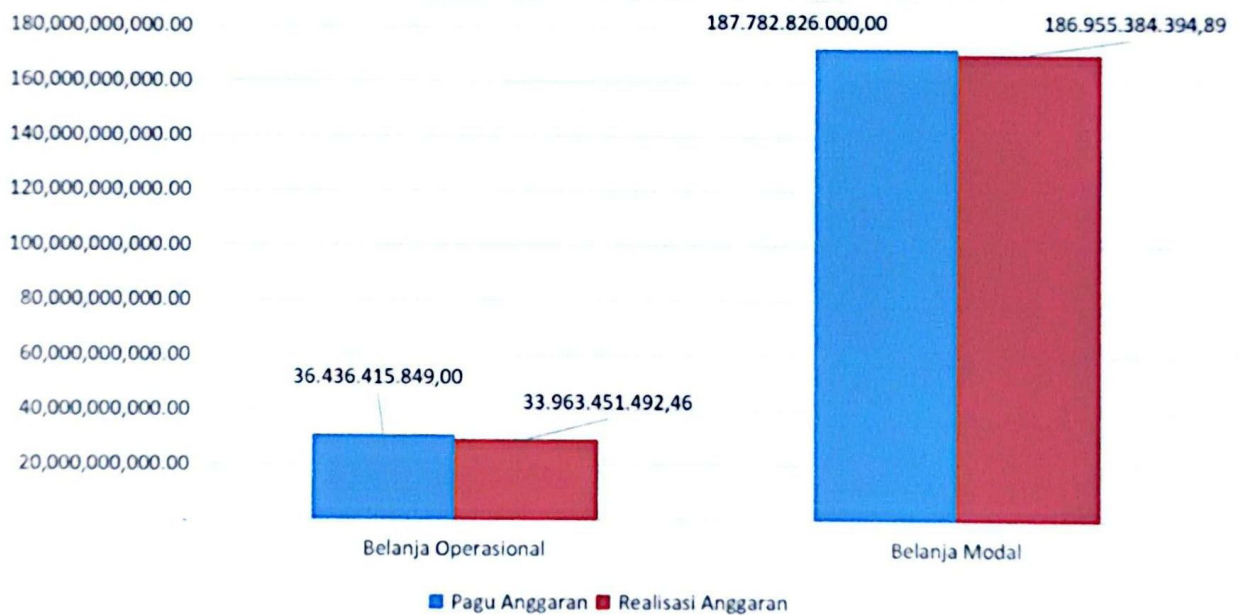
Komposisi Pagu Anggaran Dinas PERAKIM Tahun 2024



Komposisi Realisasi Dinas PERAKIM Tahun 2023



Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas PERAKIM Tahun 2024



Tabel
Realisasi Program Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
		JUMLAH (Rp)	KEUANGAN		FISIK (%)
			JUMLAH	%	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.040.257.849	24.131.359.419	89,24%	
2.	Program Pengembangan Perumahan	1.571.000.000	1.565.813.000	99,67%	
3.	Program Kawasan Permukiman	24.529.869.000	24.271.739.950	98,95%	
4.	Program Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.922.230.000	2.851.800.000	95,57%	
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	168.155.885.000	167.571.627.018	99,65%	

Tabel
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2024

		Jumlah DPA			
No	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Kegiatan	Jumlah Total Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik %
			Rp	%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.040.257.849	24.131.359.419	89,24%	97%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.130.000	15.620.000	81,65%	81,57%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.130.000	15.620.000	81,65%	81,57%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.878.950.799	3.709.484.417	95,63%	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.929.870.799	2.779.884.417	94,88%	100%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	949.080.000	929.600.000	97,95%	100%
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.450.000	234.950.000	99,37%	
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	136.450.000	136.450.000	100%	100%
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	98.500.000	98,50%	100%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.334.133.550	1.061.829.961	79,59%	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.985.750	7.622.000	95,45%	100%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.484.000	134.679.309	93,86%	98,27%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.070.000	35.025.000	64,78%	100%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.134.800	89.693.600	72,84%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	14.850.000	92,81%	93,43%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989.459.000	779.960.052	78,83%	87,06%
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	648.747.500	526.496.500	81,16%	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	648.747.500	526.496.500	81,16%	92,29%
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	15.412.798.000	13.703.983.682	88,91	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	100,00%	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.281.400.000	11.772.011.005	88,64%	99,77%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.123.398.000	1.923.972.677	90,61%	99,83%
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.510.048.000	5.405.491.359	98,10%	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.808.000	82.668.000	88,12%	100%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.770.000	332.793.144	87,40%	99,36%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.990.000	57.948.263	82,80%	90,37%
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.965.480.000	4.932.081.952	99,33%	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.571.000.000	1.565.813.000	99,67%	100%
VIII	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	900.000.000	895.768.000	99,53%	
20	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	500.000.000	497.833.000	99,39%	100%
21	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	400.000.000	397.935.000	99,25%	100%
IX	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	671.000.000	670.045.000	99,86%	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

22	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	399.045.000	99,97%	100%
23	Pembangunan Rumah Bagi Korban	271.000.000	271.000.000	99,90%	100%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	24.529.869.000	24.271.739.950	98,95%	93%
24	Penyusunan /Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.313.750.000	1.285.487.500	97,85%	100%
X	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	1.338.925.000	1.301.767.500	97,22%	
25	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh	25.175.000	16.280.000	64,67%	74,18%
XI	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	23.190.944.000	22.969.972.450	99,05%	
26	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.664.000.000	1.624.000.000	97,60%	98,07%
27	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	21.526.944.000	21.345.972.450	99,16%	100%
	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.992.230.000	2.851.800.000	95,57%	100%
XII	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.992.230.000	2.851.800.000	95,31%	97,95%
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.992.230.000	2.851.800.000	95,31%	97,95%
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	168.155.885.000	167.571.627.018	99,65%	99%
XIII	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	168.155.885.000	167.571.627.018	99,65%	
29	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6.883.300.000	6.864.903.450	99,73%	99,94%
30	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	161.217.235.000	160.673.784.568	99,66%	99,93%
31	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	55.350.000	32.939.000	59,51%	97,47%
	JUMLAH	224.219.241.849	220.918.835.887	98,53%	97,4%

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan serapan anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi target. Ini dikarenakan rata-rata jumlah Persentase Realisasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat hampir seluruhnya melewati angka 80%.

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan. Namun tentunya demi kelancaran dalam pencapaian kinerja seperti yang diharapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya mencari solusi sebagai jalan keluar.

Dari penjelasan dan tabel di atas bahwa permasalahan yang di hadapi sbb :

- a. Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Pemenuhan Indikator Kinerja Utama secara maksimal adalah belum melakukan pendataan terperinci dan menyeluruh terkait Baseline maupun DED seperti Identifikasi Lokasi Rumah yang berpotensi Bencana, Identifikasi Rumah yang terkena relokasi program pemerintah, identifikasi lahan-lahan untuk rehabilitasi ataupun pembangunan Rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten.
- b. Perlunya peningkatan SDM yang Profesional dan terampil di bidangnya, dan kelengkapan database perencanaan untuk program prioritas berkelanjutan.

Solusi :

Adapun Solusi dari permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. Melakukan konsultasi dengan instansi terkait seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait penganggaran untuk pemenuhan target tersebut untuk Tahun 2024 di Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bidang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya
- d. Selanjutnya pada Tahun 2024 nantinya juga, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja utama dengan memasukkan anggaran terkait Baseline Data, DED serta Identifikasi yang digunakan sebagai dasar dalam kegiatan Rehabilitasi serta Pembangunan Rumah Korban Bencana dan Relokasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten Tahun 2024 nantinya.
- e. Perlunya penambahan personil SDM yang Profesional dan terampil di bidangnya.

BAB IV PENUTUP

Pada umumnya Laporan Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) telah menunjukkan angka yang cukup baik. Itu artinya PERAKIM telah melakukan tugas dan fungsinya juga dengan baik. Walau demikian PERAKIM masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan terutama dari pencapaian indikator yang masih dianggap lemah.

Pada Tahun 2024, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berimbang antara yang telah mencapai target dengan yang belum mencapai target, yakni sebanyak 4 indikator yang mencapai target Namun demikian Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman akan terus berupaya untuk melakukan pemenuhan terhadap capaian indikator sebagai tindak tanggungjawab terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang hasil yang lebih maksimal.

Disadari sepenuhnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih jauh dari kata sempurna, namun untuk selanjutnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadikan sumber informasi bagi yang membutuhkan dengan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 02 Januari 2025

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAFRIZ, ST

Aminda

NP. 19820126 201001 1 015